

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG GERAKAN MAHASISWA**

#### **2.1 Kondisi Politik**

Periode pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dimulai pada tahun 2014 menandai berakhirnya satu dekade kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Latar belakang Jokowi yang bukan berasal dari kalangan elit sangat berkebalikan dengan lawan politiknya, Prabowo Subianto yang dikenal sebagai mantan menantu presiden Soeharto sekaligus putra dari mantan menteri orde lama dan orde baru, Sumitro Djojohadikusumo. Mayoritas pemilih Jokowi pada saat itu, menaruh harapan besar agar bisa terbebas dari bayang-bayang orde baru yang korup dan penuh otoriter. Rekam jejaknya sebagai mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta juga menampilkan Jokowi sebagai pemimpin dengan citra merakyat dan independen.

Pada masa kampanye, Jokowi mengusung sembilan agenda prioritas pemerintah yang dinamai Nawacita. Konsepsi nawacita menjadi jalan ideologis pembangunan nasional pada masa pemerintahan Jokowi.<sup>36</sup> Nawacita bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sesuai dengan semangat Trisakti Soekarno. Sembilan poin Nawacita mencakup: (1) Menghadirkan kembali

---

<sup>36</sup> Hastangka. Doktrin Filsafat Politik Jokowi Dan Janji Nawacita (Mengurai Gagasan Revolusi Mental). Yogyakarta: Jurnal Pancasila, 2020, hlm. 39-44.

negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan. Yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa melalui pendidikan yang memperkuat jati diri Indonesia; dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Realisasi Nawacita terlihat pada pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua dan tol laut, namun menghadapi tantangan seperti pelemahan pemberantasan korupsi, kesenjangan ekonomi yang masih tinggi, dan penyelesaian kasus HAM yang stagnan.

Pemerintahan Joko Widodo dimulai sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2014. Citra Jokowi sebagai calon presiden yang merakyat dan visi Nawacitanya yang reformis berhasil memenangkan simpati pendukungnya. Namun, di awal masa kepemimpinannya, sejumlah isu kontroversial memicu aksi demonstrasi sebagai protes terhadap beberapa kebijakan. Salah satu kontroversi utama adalah pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri pada awal 2015, meskipun ia

terseret dugaan kasus korupsi.<sup>37</sup> Publik memandang langkah ini sebagai politik "balas budi" karena Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P, partai pendukung utama Jokowi. Ketegangan meningkat akibat konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, ditandai dengan penahanan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, oleh Polri pada Januari 2015. Penahanan ini dianggap sebagai upaya melemahkan KPK, yang sedang menyelidiki kasus Budi Gunawan. Kontroversi ini memicu gelombang protes dari masyarakat sipil dan aktivis antikorupsi, yang menilai pemerintahan Jokowi tidak sejalan dengan janji Nawacitanya, terutama poin kedua dan keempat tentang pemerintahan bersih dan reformasi hukum bebas korupsi. Meskipun Jokowi akhirnya membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri pada Februari 2015 dan menempatkannya di posisi lain, kasus ini mencoreng citra reformis pemerintahannya dan memunculkan keraguan publik terhadap komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Kebijakan kontroversial lainnya di awal pemerintahan Jokowi-JK adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pengurangan subsidi bahan bakar untuk mengalihkan anggaran ke sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.<sup>38</sup> Beberapa contoh pengalihan anggaran ini diantaranya adalah pemberian kartu indonesia pintar (KIP), kartu indonesia sehat (KIS), dan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada masyarakat miskin. Keputusan ini diumumkan

---

<sup>37</sup> Ahmad Sahid, Konflik KPK vs Polri Jilid III: Kontestasi Kuasa dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Asy-syari'ah*, 18(1), 2016, hlm. 139-48

<sup>38</sup> Muchus, Mahasiswa Solo Demo Tuntut Presiden Jokowi Selesaikan 7 Agenda Ini," Detik.com, 14 November 2014, <https://news.detik.com/berita/d-2723954/mahasiswa-solo-demo-tuntut-presiden-jokowi-selesaikan-7-agenda-ini> (diakses 10 Mei 2025).

pada November 2014, menaikkan harga bensin dan solar bersubsidi, dengan tujuan menghemat anggaran negara guna mendukung program prioritas Nawacita, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas sosial. Namun, kebijakan ini memicu protes keras dari masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok akibat efek domino dari harga BBM.

Kebijakan kontroversial di awal pemerintahan Jokowi-JK memicu aksi protes dari berbagai kalangan yang memuncak pada 28 Januari 2015, tepat 100 hari setelah pelantikan.<sup>39</sup> Ratusan mahasiswa, buruh, petani, dan nelayan menggelar aksi di depan Istana Merdeka, memprotes ketidaktegasan Jokowi dalam menangani pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri meski telah jadi tersangka KPK. Mereka juga mengecam kriminalisasi terhadap komisioner KPK, Bambang Widjajanto, yang dianggap sebagai bentuk balas dendam kepolisian. Selain itu, demonstrasi turut menyoroti kenaikan harga BBM pada November 2014 yang dinilai memberatkan rakyat kecil. Aksi ini mencerminkan kekecewaan terhadap kebijakan awal Jokowi yang dianggap tidak sejalan dengan janji Nawacita.

Selain kenaikan BBM dan isu antara KPK dan Polri, pada awal tahun 2015, tepatnya pada tanggal 8 Januari 2015, Aksi Kamisan pertama pada tahun itu dimulai. Aksi kamisan merupakan aksi yang dilakukan untuk mencari keadilan

---

<sup>39</sup> Qorib dan Waru, Identitas Jokowi dalam Pelantikan Presiden Periode 2014 & 2019 di Televisi, Communicator Sphere, 2(1), 2022, hlm. 1-19.

bagi para korban pelanggaran HAM, aksi ini telah konsisten dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya namun masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Keluarga korban pelanggaran HAM memulai aksi diamnya di depan Istana Merdeka dengan menggunakan payung hitam sebagai simbol dari Aksi Kamisan ini. Aksi Kamisan sendiri telah dilakukan sejak 18 Januari 2007, secara resmi dinamakan sebagai Aksi Diam (2007) sebagai salah satu kegiatan paguyuban Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK).<sup>40</sup> Kemudian masyarakat yang menyaksikan aksi, menyebutnya secara populer sebagai Aksi Payung Hitam (2007), Aksi Payung Hitam Kamisan (2015), dan Aksi Kamisan (2016-sekarang). Hal tersebut terjadi karena setiap melakukan aksi di Taman Aspirasi atau Jl. Silang Monas Barat Laut yang tepat di seberang Istana Merdeka/Istana Presiden, Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, para peserta aksi selalu membawa payung hitam sebagai maskot atau simbol perjuangan. Payung dianggap sebagai pelindung fisik atas hujan dan terik matahari, dan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan perlindungan Illahi.

Akhir tahun 2015 ditutup dengan aksi kritis mahasiswa terhadap satu tahun kinerja Jokowi-JK pada 20 Oktober 2015. Sebanyak 2.000 mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2015.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Yudistira dan Husodo, Sejarah Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007-2021, dalam Jurnal Ceteris Paribus, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 1-10.

<sup>41</sup> Richo Pramono, Setahun Jokowi-JK, BEM se-Indonesia Demonstrasi Depan Istana, Liputan6.com, 20 Oktober 2015, <https://www.liputan6.com/news/read/2351263/setahun-jokowi>

Aksi ini mencerminkan kondisi politik yang tengah memanas saat itu, di mana mahasiswa menyoroti berbagai isu krusial yang menjadi sorotan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Selain sebagai unjuk rasa, aksi ini menghadirkan kegiatan "Sidang Rakyat," sebuah forum simbolis yang dirancang untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan selama setahun berjalan. Isu-isu yang diangkat mencakup tantangan ekonomi, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memicu keresahan masyarakat, serta kebijakan sosial dan politik yang dianggap belum memenuhi ekspektasi rakyat. Mahasiswa juga menyinggung isu penegakan hukum, termasuk dinamika hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, yang pada 2015 menjadi perhatian nasional akibat konflik yang mencuat. Melalui "Sidang Rakyat," Aliansi BEM SI berupaya menyuarakan aspirasi rakyat, mengevaluasi kinerja pemerintahan, dan menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap permasalahan sosial-ekonomi serta reformasi hukum yang mendesak.

Memasuki tahun 2016, kondisi politik Indonesia masih dipenuhi ketegangan, meskipun tidak seintens tahun 2015 yang ditandai oleh isu-isu seperti kenaikan harga BBM dan konflik antara KPK dan Polri. Pemerintahan Jokowi-JK kembali menjadi sorotan, khususnya di kalangan buruh, akibat kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan pekerja. Salah satu isu utama yang memicu keresahan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

tentang Pengupahan, yang ditandatangani pada 23 Oktober 2015.<sup>42</sup> Peraturan ini mengatur penetapan upah minimum berdasarkan formula yang mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dianggap oleh serikat buruh sebagai bentuk "politik upah murah" yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja. PP ini juga dianggap membatasi ruang negosiasi antara pekerja dan pengusaha, serta gagal mengatasi kesenjangan upah yang semakin lebar antara pekerja dan pengusaha.

Pada peringatan Hari Buruh Sedunia, 1 Mei 2016, ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota, termasuk Jakarta.<sup>43</sup> Aksi ini tidak hanya melibatkan buruh, tetapi juga mendapat dukungan luas dari petani, nelayan, dan mahasiswa, yang bersama-sama menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Tuntutan utama mereka mencakup penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, yang dianggap merampas hak pekerja atas kepastian kerja dan jaminan sosial. Selain itu, buruh menuntut pencabutan PP No. 78/2015, karena peraturan ini dianggap tidak berpihak pada pekerja dan lebih menguntungkan pengusaha.<sup>44</sup> Menurut serikat buruh, formula upah minimum dalam PP tersebut tidak mencerminkan

---

<sup>42</sup> Mahesa dan K. Sabar, Dilema Pemberlakuan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan: Disparitas yang Kian Melebar, *Journal of Politics and Policy*, 1(2), 2019, hlm. 83-100.

<sup>43</sup> Zumrotul Abidin, Demo Mahasiswa Bergabung dengan Massa Buruh di Grahadi, *Suara Surabaya*, 2 Mei 2016, <https://www.suarasurabaya.net/kelankota/2016/Demo-Mahasiswa-Bergabung-dengan-Massa-Buruh-di-Grahadi/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

<sup>44</sup> Budijanto, Upah Layak bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 2017, hlm. 395–412.

realitas biaya hidup, terutama di daerah perkotaan seperti Jabodetabek, dan cenderung mempertahankan upah rendah yang tidak manusiawi. Mereka juga mengkritik kurangnya komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dalam perhitungan upah, yang seharusnya mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Aksi pada 1 Mei 2016 ini tidak mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah, baik dalam bentuk revisi kebijakan maupun dialog yang konstruktif. Ketidakpuasan ini memicu rencana aksi lanjutan yang lebih besar oleh KSPI, yang mengoordinasikan demonstrasi susulan pada akhir Oktober hingga awal November 2016.<sup>45</sup> Aksi lanjutan ini melibatkan koalisi yang lebih luas, termasuk buruh, petani, nelayan, dan mahasiswa, yang bersatu untuk menekan pemerintah agar mencabut PP No. 78/2015 dan menghapus sistem kerja kontrak serta outsourcing. Demo ini juga menyoroti soal lingkungan dan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap lebih berpihak ke korporasi. Aksi terus berlanjut karena buruh merasa pemerintah belum serius menangani ketimpangan sosial dan ekonomi, apalagi di tengah tekanan ekonomi dan naiknya biaya hidup. KSPI dan pendukungnya ingin suara mereka didengar menjelang akhir tahun, saat kinerja pemerintah biasanya dievaluasi. Demo di depan Istana dan DPR jadi simbol penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, sekaligus menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga

---

<sup>45</sup> Septian Deny, Ajak Mahasiswa, Buruh Gelar Demo Besar pada Oktober 2016, Liputan6.com, 23 Mei 2016, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2517389/ajak-mahasiswa-buruh-gelar-demo-besar-pada-oktober-2016>, diakses pada tanggal 11 Mei 2025

keadilan dan demokrasi.

Pada tahun 2017, kondisi politik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih diwarnai oleh ketegangan sosial-ekonomi dan polarisasi politik, yang sebagian besar dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Setelah tahun 2016 yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan sistem kerja kontrak, tahun 2017 menyaksikan gelombang protes baru yang menyoroti berbagai kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah. Ketidakpuasan masyarakat, terutama dari kalangan buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil, mencapai puncaknya akibat serangkaian kenaikan harga kebutuhan dasar serta kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan berorganisasi.

Salah satu isu utama yang memicu ketegangan politik pada 2017 adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, serta biaya administrasi kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).<sup>46</sup> Sejak awal pemerintahan Jokowi-JK, kebijakan pengalihan subsidi BBM dari Premium ke Solar (dengan subsidi tetap Rp1.000 per liter) berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 telah menuai kritik karena dianggap tidak tepat sasaran. Pada 2017, kenaikan harga BBM non-subsidi, seperti Pertalite dan Pertamax, juga memicu protes karena berdampak pada

---

<sup>46</sup> Panjimas, Kado Pahit Kenaikan Harga di Tahun 2017, Mahasiswa Solo Demo: Jokowi Piye Tho Pak, Jare Pro Rakyat?. Panjimas.com, 10 Januari 2017, <https://tinyurl.com/solo-demo2017>, diakses pada tanggal 11 Mei 2025.

meningkatnya biaya transportasi dan harga barang kebutuhan pokok. Masyarakat, terutama buruh dan pengemudi angkutan umum, menuntut pencabutan kenaikan harga ini karena memperberat beban hidup di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca- krisis global.

Selain itu, kenaikan tarif listrik, khususnya untuk golongan 900 VA, menjadi isu sensitif. Pada 2016, pemerintah mulai menghapus subsidi listrik untuk rumah tangga 900 VA secara bertahap, dengan alasan bahwa banyak pelanggan dalam golongan ini bukan masyarakat miskin. Namun, kebijakan ini memicu kemarahan karena banyak keluarga kelas menengah ke bawah masih bergantung pada tarif rendah untuk kebutuhan sehari-hari. Tuntutan untuk mencabut kenaikan tarif listrik ini sering disuarakan dalam aksi demonstrasi, terutama oleh serikat buruh dan mahasiswa, yang melihatnya sebagai beban tambahan di tengah inflasi.<sup>47</sup> Kenaikan biaya STNK dan BPKB juga menjadi sorotan karena menambah biaya operasional bagi pemilik kendaraan, terutama pengusaha kecil dan sopir angkutan umum. Demonstrasi menuntut pencabutan kenaikan ini sering digelar di depan Istana Negara dan gedung DPR, dengan pengunjuk rasa menyoroti dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Ketidakpuasan terhadap respons pemerintah yang dianggap lamban mendorong serikat buruh seperti KSPI untuk menggelar aksi lanjutan hingga akhir tahun. Demonstrasi dilakukan di berbagai lokasi strategis seperti Istana

---

<sup>47</sup> T. Ilham dan Z. Siregar, Kenaikan BBM dalam Bingkai Media, Jurnal Riset Ilmu Komunikasi dan Media, 1(1), 2024, hlm. 42–51

Negara dan kantor-kantor BUMN, dengan tuntutan utama berupa pencabutan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan serta sorotan terhadap ketidakadilan yang dialami pegawai BUMN. Isu ini juga diperkuat dengan kritik terhadap Perppu Ormas yang dianggap mengancam demokrasi, sehingga mengundang solidaritas dari kelompok masyarakat sipil lainnya.

Memasuki tahun 2018, tepatnya pada pertengahan Februari 2018, gelombang demonstrasi melanda sejumlah kota besar di Indonesia, terutama Jakarta, sebagai respons terhadap pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).<sup>48</sup> Revisi ini memicu kemarahan publik karena dianggap memperkuat posisi anggota DPR secara berlebihan sekaligus mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa pasal dalam revisi UU MD3, seperti yang mengatur imunitas hukum anggota DPR, dinilai mempersulit penegakan hukum terhadap kasus korupsi atau pelanggaran lainnya, karena proses penyelidikan memerlukan persetujuan DPR. Selain itu, pasal yang memungkinkan DPR mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang dianggap menghina institusi atau anggotanya dianggap mengancam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Pasal-pasal ini memicu persepsi bahwa DPR berupaya melindungi kepentingan elit politik di tengah rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Akibatnya, masyarakat sipil, termasuk aktivis dan akademisi,

---

<sup>48</sup> Subekti, Aksi Longmarch Mahasiswa Tolak UU MD3, Tempo.co, 22 Februari 2018, <https://www.tempo.co/foto/arsip/aksi-longmarch-mahasiswa-tolak-uu-md3-402130>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

menggelar demonstrasi besar-besaran di jalanan untuk menuntut pencabutan revisi UU MD3, yang dianggap anti-demokrasi dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Aksi- aksi ini diwarnai dengan spanduk dan orasi yang mengecam pasal-pasal bermasalah dalam revisi tersebut. Selain itu, sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan tren aktivisme digital, mulai muncul petisi online di platform seperti Change.org yang menyerukan penolakan terhadap UU MD3.<sup>49</sup> Petisi ini, meskipun belum sebesar aksi jalanan, mulai mendapat perhatian dan dukungan masyarakat, mencerminkan semakin beragamnya bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan.

Di sisi lain, aksi demonstrasi pada tahun 2018 juga didorong oleh tuntutan buruh yang menyoroti isu kesejahteraan. Para buruh menuntut upah yang layak, perbaikan kondisi kerja, dan penghapusan regulasi yang dianggap merugikan hak- hak pekerja.<sup>50</sup> Ketimpangan antara upah yang rendah dengan beban kerja yang berat, ditambah meningkatnya biaya hidup, memicu rasa ketidakadilan di kalangan buruh. Regulasi yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan pengusaha semakin memperburuk situasi, mendorong buruh untuk menggelar aksi demonstrasi dan mogok kerja guna menekan pemerintah agar merespons aspirasi mereka.

Sementara itu, sektor pendidikan menjadi pemicu lain gelombang protes,

---

<sup>49</sup> Fakhri Hermansyah, Lewat Petisi Online, Netizen Tolak UU MD3. Tempo.co, [www.tempo.co/politik/lewat-petisi-online-netizen-tolak-uu-md3-973865](http://www.tempo.co/politik/lewat-petisi-online-netizen-tolak-uu-md3-973865), diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

<sup>50</sup> Budijanto, Upah Layak bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(3), 2017, hlm. 395-412.

terutama dari kalangan mahasiswa dan aktivis pendidikan. Mereka menuntut implementasi wajib belajar 12 tahun yang didukung payung hukum yang jelas, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD.<sup>51</sup> Namun, realitas menunjukkan bahwa anggaran pendidikan sering kali tidak mencapai target tersebut, mengakibatkan kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, serta rendahnya kesejahteraan guru.

Isu lain yang memicu protes adalah wacana pemberlakuan student loan untuk biaya pendidikan tinggi, yang dianggap akan membebani mahasiswa pasca- kelulusan dengan utang. Selain itu, revisi Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang mengatur otonomi pengelolaan perguruan tinggi juga menuai kritik karena dianggap membuka peluang komersialisasi pendidikan, yang berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi berkualitas. Ketidakpuasan terhadap berbagai isu ini memuncak dalam aksi demonstrasi besar-besaran, di mana mahasiswa dan aktivis menyerukan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Tahun 2019 menjadi salah satu periode paling bergolak dalam dinamika politik Indonesia pasca-Reformasi 1998, ditandai dengan gelombang demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai aksi #ReformasiDikorupsi. Aksi ini melibatkan puluhan ribu mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil di berbagai

---

<sup>51</sup> Aliko Noor, Utang Pendidikan Mencekik, Mahasiswa Demo di Hardiknas, Viva.co.id, 2 Mei 2018, <https://www.viva.co.id/berita/metro/1032324-utang-pendidikan-mencekik-mahasiswa-demo-di-hardiknas>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya, dipicu oleh serangkaian kebijakan pemerintahan dan DPR yang dianggap merugikan rakyat serta melemahkan demokrasi. Di antara isu utama yang memicu kemarahan adalah pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada 17 September 2019 dan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).<sup>52</sup> Namun, protes tidak hanya terbatas pada dua isu ini; berbagai kebijakan lain di tahun 2019 juga memicu ketegangan sosial dan politik, mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Pada 16 September 2019, 82,61% publik menentang revisi ini dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolaknya.<sup>53</sup> Massa menilai revisi ini melindungi elit politik dan pengusaha korup, sehingga memicu demonstrasi besar-besaran pada 23-24 September 2019 di depan Gedung DPR, yang diwarnai kerusuhan, termasuk penggunaan gas air mata oleh polisi serta laporan kekerasan oleh aparat. Selain aksi jalanan, protes juga mulai merambah ranah digital dengan kemunculan petisi online di platform seperti Change.org. Petisi yang menyerukan pembatalan revisi UU KPK itu mendapat dukungan besar, dengan 519.780 tanda tangan dari masyarakat.<sup>54</sup> Hal ini mencerminkan upaya

---

<sup>52</sup> Budi Setiawan, Revisi UU KPK Disahkan, di Tengah Penentangan Pegiat Antikorupsi karena Menganggap 'Melemahkan' Upaya Tangani Korupsi, BBC Indonesia, 17 September 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49723972> (diakses 17 Mei 2025).

<sup>53</sup> AA Rahman, "82,61 Persen Masyarakat Minta Jokowi Tolak Revisi UU KPK," Tempo.co, 16 September 2019, <https://www.tempo.co/politik/82-61-persen-masyarakat-minta-jokowi-tolak-revisi-uu-kpk-706300> (diakses 17 Mei 2025).

<sup>54</sup> S. Alifa, H. M. Syam, dan N. Muharman, Implikasi Petisi Online Platform Change.org

masyarakat sipil memanfaatkan teknologi untuk memperluas suara penolakan, meskipun skalanya belum sebesar aksi fisik.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi isu lain yang memicu kemarahan. RKUHP mengandung pasal-pasal kontroversial, seperti kriminalisasi seks di luar nikah, penghinaan terhadap presiden, dan pelarangan aborsi tanpa alasan medis darurat.<sup>55</sup> Pasal-pasal ini dianggap membatasi kebebasan sipil, terutama bagi perempuan dan minoritas, serta bertentangan dengan semangat demokrasi. Meskipun Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara RKUHP pada 20 September 2019 setelah gelombang protes, ketidakpercayaan terhadap DPR tetap tinggi karena proses pembahasannya dianggap tertutup dan minim partisipasi publik. Mahasiswa, yang menjadi motor utama aksi #ReformasiDikorupsi, menyuarakan mosi tidak percaya kepada DPR, menyebutnya sebagai "Dewan Pengkhianat Rakyat" karena dianggap mengabaikan aspirasi rakyat.

Isu-isu di atas memicu demonstrasi karena mencerminkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan dan DPR yang dianggap mengabaikan aspirasi rakyat. Revisi UU KPK dan RKUHP dipandang sebagai pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998 yang menjanjikan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Kebijakan-kebijakan ini ditambah dengan isu lingkungan, HAM, dan pendidikan, memperkuat narasi bahwa elit politik lebih memihak

---

terhadap Kebijakan RKUHP dan UU MD3, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 6(2), 2021, hlm. 6

<sup>55</sup> Ihsanuddin & Bayu Galih, "Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda," Kompas.com, 20 September 2019, <https://tinyurl.com/kompas-rkuhp> (diakses 10 Mei 2025).

kepentingan oligarki ketimbang rakyat.

## 2.2 Kondisi Ekonomi

Pada awal pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014, Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi yang cukup kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, ketimpangan kesejahteraan, serta tingginya harga kebutuhan pokok menjadi keluhan utama masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, pemerintahan Jokowi-JK membawa harapan baru melalui program Nawacita yang menjanjikan pembangunan dari pinggiran, penguatan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>56</sup> Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program Nawacita belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan-persoalan struktural ekonomi yang ada. Ketimpangan sosial masih terasa, dan kebijakan ekonomi dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil, sehingga muncul kritik terhadap ketidaksesuaian antara janji politik dan realitas yang dihadapi masyarakat.

Pada tahun 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo memulai periode pertamanya dengan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Anggaran infrastruktur dalam APBN melonjak signifikan sebesar 62,7%, menandai komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan jalan, distribusi listrik, dan fasilitas sosial.<sup>57</sup> Namun, pembangunan ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, menyebabkan

---

<sup>56</sup> Qorib dan Waru, Identitas Jokowi dalam Pelantikan Presiden Periode 2014-2019 di Televisi, *Communicator Sphere*, 2(1), 2022, hlm 1-19

<sup>57</sup> Brilyawan dan Santosa, Pengaruh Infrastruktur Sosial dan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019, *Diponegoro Journal of Economics*, vol. 10, no. 1, 2021.

ketimpangan regional, dengan sembilan provinsi, termasuk Kalimantan Timur, hanya mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi 1,79%, jauh di bawah rata-rata nasional 5,03%. Untuk melengkapi upaya domestik ini, pemerintah juga memperkuat hubungan kerja sama internasional, terutama dengan Tiongkok, melalui penandatanganan 36 Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup sektor perekonomian, budaya, pendidikan, dan pariwisata, guna menarik investasi asing.<sup>58</sup>

Meskipun langkah-langkah ini awalnya menumbuhkan kepercayaan publik terhadap reformasi ekonomi, dampaknya tidak bertahan lama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat signifikan, mencapai titik terendah 4,7% pada triwulan II tahun 2015, turun dari 6,8% pada tahun 2010.<sup>59</sup> Perlambatan ini dipicu oleh iklim investasi yang belum membaik secara signifikan hingga pertengahan 2015 serta ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah, yang menghambat kemajuan proyek infrastruktur.

Tantangan ekonomi yang dihadapi Jokowi tidak hanya bersumber dari dalam negeri, tetapi juga dari kondisi eksternal yang kurang kondusif. Perlambatan ekonomi global, terutama resesi di Eropa dan Jepang serta perlambatan pertumbuhan di Tiongkok dan India, memengaruhi ekspor

---

<sup>58</sup> Andika dan Aisyah, Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? Indonesian Perspective, vol. 2, no. 2, 2017, hlm. 161-179.

<sup>59</sup> H. Aswicahyono dan D. Christian, Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016," Centre for Strategic and International Studies (CSIS), vol. 2, 2017, hlm. 3

Indonesia.<sup>60</sup> Penurunan harga komoditas ekspor, seperti minyak sawit dan batubara, serta likuiditas global yang menyusut semakin memperberat situasi. Jokowi kemudian mengadopsi pendekatan reformasi ekonomi yang berfokus pada sisi penawaran (supply-side reforms), dengan prioritas pada pengembangan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi.

Salah satu kebijakan radikal yang diambil adalah reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang dimulai kurang dari sebulan setelah pelantikan. Pada 18 November 2014, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dengan harga Premium menjadi Rp8.500 per liter dan solar bersubsidi menjadi Rp7.500 per liter.<sup>61</sup> Memanfaatkan momentum penurunan harga minyak dunia, Jokowi juga melangkah lebih jauh dengan menghapus subsidi BBM Premium, menetapkan subsidi tetap Rp1.000 per liter untuk solar, dan menerapkan mekanisme harga pasar untuk BBM. Reformasi ini berhasil mengurangi beban anggaran negara yang sebelumnya memakan porsi besar APBN untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan program prioritas lainnya.

Reformasi BBM menjadi salah satu pilar penting dalam strategi ekonomi Nawacita, visi utama pemerintahan Jokowi yang menekankan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Berdasarkan APBN Perubahan (APBNP) 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20,77 triliun untuk 74.093 desa di 434 kabupaten dan kota, yang disalurkan dalam tiga tahap yakni 40% pada

---

<sup>60</sup> Ibid., hlm. 15

<sup>61</sup> Ibid., hlm 9

April, 40% pada Agustus, dan 20% pada Oktober.<sup>62</sup> Dana ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan, sejalan dengan fokus Nawacita untuk mempercepat pembangunan di luar Jawa.

Realisasi pembangunan infrastruktur meliputi proyek-proyek strategis seperti Tol Trans-Sumatera, Tol Trans-Jawa, Jembatan Merah Putih di Ambon, Bendungan Tanju di NTT, dan pos lintas batas di Entikong, Kalimantan.<sup>63</sup> Proyek-proyek ini dirancang untuk mengurangi disparitas antarwilayah dan mendukung konektivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan paket kebijakan ekonomi I-V untuk menderegulasi peraturan yang menghambat daya saing industri nasional, memperkuat penegakan hukum, dan memberikan kepastian usaha bagi investor.

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil, didukung oleh investasi infrastruktur yang signifikan, termasuk proyek-proyek yang dibiayai China seperti Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, yang mulai digarap pada tahun ini.<sup>64</sup> Selain itu, pembangunan jalan tol seperti Cisumdawu, Manado-Bitung, dan Solo-Kertosono mulai berjalan, bertujuan meningkatkan konektivitas dan pemerataan ekonomi. Namun, ketimpangan regional tetap nyata, dengan Pulau Jawa menyumbang 60% pertumbuhan ekonomi nasional meskipun hanya mencakup 6,77% luas daratan Indonesia.

---

<sup>62</sup> M. Soleman dan M. Noer, *Nawacita sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015*. Politik, vol. 13, no. 1, 2017.

<sup>63</sup> Ibid., hlm. 9

<sup>64</sup> Brilyawan dan Santosa, Pengaruh Infrastruktur Sosial dan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, vol. 10, no. 1, 2021.

Hingga Juni 2016, pemerintah telah merilis 12 Paket Kebijakan Ekonomi, yang berfokus pada deregulasi dan insentif investasi untuk mendorong efisiensi sektor swasta.<sup>65</sup> Kebijakan impor beras di bawah Lembongan tetap kontroversial, dengan Kementerian Perdagangan mendominasi pengambilan keputusan, sementara Kementerian Pertanian hanya memberikan rekomendasi, menyebabkan ketegangan antarinstansi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2015-2019 juga menunjukkan variasi antarprovinsi. Rata-rata nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03%, tetapi sembilan provinsi, termasuk Kalimantan Timur dengan pertumbuhan terendah 1,79%, berada di bawah rata-rata nasional. Sebaliknya, Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,39%.<sup>66</sup> Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai sarana pemerataan sosial dan ekonomi. Meskipun reformasi ekonomi menunjukkan komitmen serius, tantangan seperti ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah, tekanan eksternal, dan ketegangan sosial akibat kebijakan pengupahan menghambat capaian pertumbuhan yang inklusif. Periode ini mencerminkan upaya ambisius pemerintah untuk mentransformasi ekonomi Indonesia, namun dengan hasil yang bervariasi di tengah dinamika yang kompleks.

### **2.3 Organisasi Gerakan Mahasiswa yang Terlibat**

---

<sup>65</sup> H. Aswicahyono dan D. Christian, *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS), vol. 2, 2017, hlm. 9

<sup>66</sup> F. P. Kusumah, *Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014–2019*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 10, no. 2, 2019, hlm. 137-162.

Gerakan mahasiswa di Indonesia telah menjadi salah satu elemen penting dalam sejarah perubahan sosial dan politik, mencerminkan peran mahasiswa sebagai kaum intelektual yang tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga berani bertindak di tengah situasi krisis.<sup>67</sup> Gerakan mahasiswa di Indonesia telah menjadi salah satu elemen penting dalam sejarah perubahan sosial dan politik. Peran mahasiswa tercermin sebagai kaum intelektual yang tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga berani bertindak di tengah situasi krisis. Tujuan utama gerakan ini ialah menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik.

Gerakan mahasiswa berpijak pada organisasi sebagai wadah perjuangan kolektif. Organisasi gerakan mahasiswa terbagi menjadi organisasi internal kampus dan organisasi eksternal kampus. Organisasi internal kampus meliputi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Struktur organisasi bersifat formal dan hierarkis dengan fokus pada kegiatan kampus, advokasi, dan representasi mahasiswa dalam lingkup universitas. Organisasi eksternal kampus seperti HMI, GMNI, KAMMI, dan KAMI memiliki jaringan nasional. Perannya lebih luas, mencakup aksi lintas daerah dan pembentukan wacana kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Organisasi internal maupun eksternal kampus berperan aktif dalam menggerakkan demonstrasi mahasiswa terkait berbagai isu nasional. Kolaborasi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),

---

<sup>67</sup> Andik Matulessy, Mahasiswa & Gerakan Sosial. Surabaya: SriKandi, 2005, hlm. 17

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menunjukkan solidnya keterlibatan mahasiswa lintas kelompok. Beberapa rekam jejak organisasi dan komunitas mahasiswa di antaranya yaitu:

1) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa intra-kampus yang berperan sebagai lembaga eksekutif tertinggi di tingkat universitas atau fakultas.<sup>68</sup> BEM bertugas menyalurkan aspirasi mahasiswa, mengoordinasikan kegiatan kemahasiswaan, serta mewakili mahasiswa dalam berinteraksi dengan pihak universitas dan pemerintah. BEM memiliki struktur resmi di bawah rektorat dan didukung anggaran kampus sehingga BEM memiliki legitimasi kuat di lingkungan universitas. Keunggulannya terletak pada kemampuan menyatukan mahasiswa dari berbagai jurusan dan ideologi, menjadikannya penggerak utama gerakan mahasiswa di tingkat lokal.

Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) merupakan wadah koordinasi antar-BEM universitas di Indonesia yang memperjuangkan isu-isu nasional dan memperkuat solidaritas mahasiswa. Dari 2014 hingga 2019, BEM SI secara konsisten memobilisasi mahasiswa untuk menanggapi berbagai kebijakan pemerintah yang kontroversial, dengan aksi-aksi yang

---

<sup>68</sup> Pramono, S. Suwarno, dan S. Widodo, “Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk Mencapai Program Kerja Organisasi di Universitas Kadiri,” *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara* 4, no. 1 (2020), hlm. 7

terkoordinasi di berbagai kota.

Beberapa aksi yang dilakukan BEM di seluruh Indonesia diantaranya adalah aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM bersubsidi pada akhir tahun 2014. BEM SI beraliani dengan organisasi kepemudaan seperti IMM, HMI, PMKRI, dan GMNI melakukan aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten. Di tahun yang sama juga, BEM Universitas Hasanuddin (Makassar) melakukan aksi unjuk rasa dengan memprotes isu yang sama dengan melakukan longmarch di Tamalanrea. Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM kembali terjadi pada tahun 2015. Pada Mei 2015, Aliansi BEM SI, yang mewakili 40 universitas di Indonesia, menggelar demonstrasi di depan Gedung Merdeka, Jakarta, namun tidak mendapat tanggapan memuaskan dari pemerintah.

Pada 20 Oktober 2015, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi- JK, aksi mahasiswa kembali memanas untuk menuntut berbagai isu terkait kinerja pemerintahan.<sup>69</sup> Menurut koordinator pusat BEM SI, aksi ini melibatkan ribuan mahasiswa dari 57 kampus negeri dan swasta, termasuk Universitas Negeri Lampung, STT PLN, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Solo, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Ahmad Dahlan, dan lainnya. Massa aksi menggelar sidang rakyat sebagai wujud sikap mahasiswa terhadap kinerja satu tahun

---

<sup>69</sup> Situmorang, M. *Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK*. Jakarta: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 2015, hlm. 3.

Jokowi-JK. Selain di Jakarta, BEM SI Jawa Timur juga mengadakan demonstrasi peringatan satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, diikuti perwakilan mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, ITS Surabaya, Universitas Trunojoyo, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.

Pada tahun berikutnya, demonstrasi kembali terjadi, kali ini dengan tuntutan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pengupahan. Di Surabaya, BEM UNAIR bersama dengan ratusan mahasiswa dari organisasi seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) berunjuk rasa bersama Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SBK) di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo.

Pada tahun 2017 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas, khususnya BEM Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), yang beraliansi dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Solo Raya, menggelar aksi demonstrasi menuntut pencabutan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, serta biaya STNK dan BPKB. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga

BBM non-subsidi dan mengembalikan subsidi listrik untuk daya 900 VA.

Aksi demonstrasi dilakukan dengan cara *long march* dari Bundaran Gladak menuju Balai Kota Solo, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sementara itu, pada Oktober 2017, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jakarta kembali menggelar demonstrasi sebagai peringatan tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Aksi ini berlangsung di tiga titik utama, yaitu Jalan Silang Monas, Istana Merdeka, dan Gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), sebagai wujud ekspresi aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

Pada tahun 2018, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Demonstrasi ini terjadi di beberapa kota, seperti Jombang, Surabaya, dan Jakarta, sebagai respons terhadap pasal-pasal kontroversial dalam revisi UU tersebut yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan memperkuat imunitas anggota DPR. Aksi di Jombang diikuti oleh BEM dari universitas seperti Universitas Darul Ulum dan Universitas Hasyim Asy'ari, sementara di Surabaya melibatkan BEM dari Universitas Airlangga (Unair) dan Institut Teknologi Sepuluh

Nopember (ITS). Di Jakarta, demonstrasi dipusatkan didepan Gedung DPR/MPR, dihadiri oleh BEM SI dari berbagai kampus, termasuk Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Trisakti.

Pada tahun 2019, gelombang aksi mahasiswa kembali bergema melalui gerakan #ReformasiDikorupsi yang dipicu oleh pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan sejumlah rancangan undang- undang (RUU) kontroversial, seperti RUU KUHP. Aksi ini melibatkan BEM dari berbagai universitas ternama, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Tarumanegara (Untar), serta BEM dari universitas-universitas di Medan, seperti Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Demonstrasi ini berlangsung di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Medan, dengan tuntutan utama mencakup pembatalan revisi UU KPK, penolakan RUU KUHP, dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Di Yogyakarta, aksi bertajuk “Gejayan Memanggil” menjadi simbol perlawanan mahasiswa, dipimpin oleh BEM UGM, sementara di Jakarta, mahasiswa UI dan ITB turut memimpin demonstrasi di depan Gedung DPR. Aksi- aksi ini sering kali diwarnai ketegangan dengan aparat keamanan, termasuk di Medan, di mana mahasiswa USU menghadapi tindakan represif. Gerakan ini mencerminkan semangat mahasiswa untuk memperjuangkan

demokrasi dan menentang pelemahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

## 2) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan pada 5 Februari 1947 oleh Lafran Pane, merupakan organisasi mahasiswa ekstra-kampus yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan bertujuan membentuk insan akademis yang berjiwa pengabdi serta bertanggung jawab atas keadilan sosial. HMI dikenal dengan independensinya, meskipun beberapa alumninya, seperti Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, aktif di partai politik seperti Golkar. Dalam gerakan mahasiswa 2014-2019, HMI aktif dalam isu-isu seperti penolakan intoleransi dan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat. HMI memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia, dengan kader yang terlatih melalui proses kaderisasi formal. Keberhasilan HMI dalam mencetak pemimpin nasional, seperti Anies Baswedan, menunjukkan kontribusinya dalam gerakan mahasiswa dan politik nasional.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah aktif dalam sejumlah aksi demonstrasi di Indonesia yang mencerminkan respons mereka terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Pada tahun 2014, HMI menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu oleh kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM.<sup>70</sup> Aksi ini berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta, dan diwarnai ketegangan

---

<sup>70</sup> Budi Purwanto, Polisi Seret Mahasiswa HMI dalam Demo BBM. Jakarta: Tempo.co, 2014.

dengan aparat kepolisian, di mana beberapa mahasiswa HMI dilaporkan diseret oleh polisi karena memblokade jalan sebagai bentuk protes.

Pada Mei 2015, HMI kembali melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta untuk menolak kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL).<sup>71</sup> Massa HMI bergerak dari kawasan Patung Kuda menuju Istana Negara, menuntut pemerintah membatalkan kebijakan yang dianggap membebani rakyat kecil. Aksi ini menunjukkan konsistensi HMI dalam mengkritik kebijakan ekonomi yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat.

Memasuki tahun 2016, HMI terlibat dalam Aksi Bela Islam yang merupakan bagian dari demonstrasi besar-besaran di Jakarta untuk menuntut penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).<sup>72</sup> Aksi ini, yang berpusat di kawasan Patung Kuda, mencerminkan keterlibatan HMI dalam isu keagamaan yang sensitif, sekaligus menegaskan peran organisasi ini dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya pada tahun 2018, HMI menggelar demonstrasi untuk memperingati 20 tahun Reformasi di depan Istana Merdeka, Jakarta.<sup>73</sup> Aksi ini diwarnai keriuhan, di mana tujuh mahasiswa HMI dilaporkan terluka akibat bentrokan dengan polisi setelah aksi pembakaran ban. Massa

---

<sup>71</sup> Rohmah Ermawati, Demo Mei 2015, Massa HMI Bergerak Kepung Istana. Jakarta: Espos, 2015.

<sup>72</sup> Satya Adhi, Mahasiswa Berlebaran Kuda. Jakarta: Saluransebelas.com, 2016.

<sup>73</sup> Setyo Adi Nugroho, PB HMI Sayangkan Aparat Represif di Demo 20 Tahun Reformasi. Jakarta: Kompas.com, 2018.

menuntut pencopotan pejabat tinggi negara seperti Kapolri dan Kepala BIN, serta mendesak mundurnya Presiden Joko Widodo karena dianggap gagal menjalankan amanat reformasi.

Pada tahun 2019, HMI bersama berbagai elemen mahasiswa lainnya menggelar aksi menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang KPK.<sup>74</sup> Demonstrasi ini berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta, dengan massa membawa spanduk dan poster yang mengkritik pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP serta pelemahan KPK melalui revisi undang-undang. Aksi ini berhasil memaksa DPR untuk mengadakan audiensi dengan mahasiswa, meskipun tidak semua tuntutan dipenuhi. Secara keseluruhan, demonstrasi-demonstrasi ini menunjukkan peran aktif HMI sebagai organisasi mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, baik dalam isu ekonomi, agama, maupun reformasi tata kelola pemerintahan, meskipun sering kali berhadapan dengan respons represif dari aparat keamanan

### 3) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Didirikan pada 23 Maret 1954 di Surabaya, merupakan organisasi mahasiswa ekstra-kampus yang mengusung ideologi nasionalisme dan Marhaenisme, yang terinspirasi dari pemikiran Soekarno. GMNI lahir dari fusi tiga organisasi mahasiswa: Gerakan Mahasiswa Marhaen, Gerakan

---

<sup>74</sup> Rivan Awal Lingga, HMI Gelar Aksi Tolak RKUHP dan UU KPK di Jakarta. Jakarta: Tempo.co, 2019.

Mahasiswa Merdeka, dan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia. Organisasi ini fokus pada pembelaan terhadap kaum marhaen (rakyat kecil) dan keadilan sosial.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) telah menunjukkan peran aktifnya dalam aksi-aksi demonstrasi di Indonesia untuk menentang berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Pada tahun 2014, GMNI menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Jakarta.<sup>75</sup> Aksi ini merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang mengurangi subsidi BBM, yang dinilai memberatkan masyarakat kecil. Massa GMNI berkumpul di depan Istana Negara, menyuarakan aspirasi agar pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut demi kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2016, GMNI bergabung dengan elemen buruh dalam aksi menentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.<sup>76</sup> Demonstrasi ini menyoroti ketidakadilan dalam sistem pengupahan yang dianggap tidak memihak kepada buruh, dengan GMNI mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak pekerja, termasuk upah yang layak dan perlindungan tenaga kerja. Selanjutnya, pada tahun 2018, GMNI di Palopo, Sulawesi Selatan, menggelar aksi menolak

---

<sup>75</sup> Asep Fathulrahman, Demo Tolak Kenaikan BBM. Jakarta: Antara News, 2014.

<sup>76</sup> Dennis Aditia, GMNI Desak Pemerintah Perhatikan Hak Buruh. Jakarta: JPNN.com, 2016

revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).<sup>77</sup> Aksi ini dipicu oleh pasal-pasal kontroversial dalam revisi UU MD3, seperti kekebalan hukum bagi anggota DPR, yang dianggap melemahkan supremasi hukum dan akuntabilitas wakil rakyat.

Pada tahun 2019, GMNI bersama ratusan dosen dan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya menggelar demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang- Undang KPK.<sup>78</sup> Aksi ini menyoroti pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP serta pelemahan KPK melalui revisi undang-undang, yang dinilai mengancam demokrasi dan pemberantasan korupsi. Demonstrasi ini berlangsung di depan kampus Unair, dengan massa membawa spanduk dan orasi yang menuntut DPR membatalkan pengesahan kedua regulasi tersebut. Secara keseluruhan, aksi-aksi GMNI ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memperjuangkan keadilan sosial, hak buruh, dan supremasi hukum, sekaligus menunjukkan keterlibatan aktif mahasiswa dalam menanggapi isu-isu krusial di Indonesia.

#### 4) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

KAMMI didirikan pada 29 Maret 1998 di Malang. Berbasis pada gerakan Tarbiyah dan nilai-nilai Islam, KAMMI lahir sebagai respons terhadap krisis sosial, politik, dan ekonomi pada masa Reformasi, dengan

---

<sup>77</sup> Hana Hanifah, GMNI Palopo Aksi Tolak UUD MD3. Makassar: Tribunnews.com, 2018

<sup>78</sup> Fathurrohman, Tolak Revisi UU KPK, Ratusan Dosen & Mahasiswa Unair Unjuk Rasa. Surabaya: Tempo.co, 2019.

tujuan menciptakan kader Muslim yang negarawan. Di tahun 2014-2019, KAMMI aktif dalam aksi-aksi seperti penolakan revisi UU KPK dan RKUHP. KAMMI dikenal dengan kaderisasi yang militan dan terstruktur, yang menanamkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam aktivitas politik kampus.

KAMMI telah terlibat dalam sejumlah demonstrasi penting di Indonesia sebagai respons terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik, mencerminkan peran mereka sebagai organisasi mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pertama, pada tahun 2014, KAMMI menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kota Malang, Jawa Timur.<sup>79</sup> Ratusan mahasiswa KAMMI berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Malang, menuntut pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan BBM yang dianggap membebani kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat kecil. Aksi ini menunjukkan kepedulian KAMMI terhadap dampak kebijakan ekonomi pada rakyat.

Pada Mei 2016, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, KAMMI di Semarang dan Makassar menggelar demonstrasi menuntut pencabutan atau revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.<sup>80</sup> Dalam aksi di Semarang, KAMMI menyuarakan "Manifesto Reformasi," menyoroti perlunya reformasi sistem pendidikan

---

<sup>79</sup> Kinanti Ajeng, Massa KAMMI Gabung dengan BEM se-Indonesia, Lalin Sekitar Istana Macet. Jakarta: Detik.com, 2015.

<sup>80</sup> Fadhil Ubaidillah, KAMMI Makassar Demo Tuntut Pemerintah Cabut UU Pendidikan. Makassar: Tribunnews.com, 2016

tinggi yang lebih berkeadilan dan mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan mahasiswa serta kualitas pendidikan.<sup>81</sup> Di Makassar, KAMMI juga menegaskan bahwa UU tersebut dinilai tidak mendukung peningkatan akses pendidikan yang merata.

Pada Februari 2018, KAMMI bersama elemen mahasiswa lainnya di Surabaya menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).<sup>82</sup> Demonstrasi ini menyoroti pasal-pasal kontroversial, seperti kekebalan hukum anggota DPR, yang dianggap melemahkan akuntabilitas dan supremasi hukum. Aksi ini berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Timur, dengan massa KAMMI menyampaikan orasi dan spanduk berisi penolakan terhadap UU MD3.

Pada September 2019, KAMMI bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia dalam demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan berbagai kota lain, seperti Semarang dan Surabaya, untuk menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang KPK. Di Jakarta, aksi KAMMI menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar Istana Negara, menuntut pembatalan revisi UU KPK yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi serta menolak pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP.

Di Semarang, KAMMI bersama mahasiswa lain berhasil mendorong

---

<sup>81</sup> Ahmad Fauzan, Aksi Harkitnas KAMMI Semarang Suarakan Manifesto Reformasi. Semarang: Kabarkampus.com, 2016.

<sup>82</sup> Danendra Kusumawardhana, Mahasiswa Lintas Elemen di Surabaya Demo Tolak UU MD3. Surabaya: Tribunnews.com, 2018.

DPRD Jawa Tengah untuk menyatakan sikap menolak RKUHP dan mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).<sup>83</sup> Aksi-aksi ini menegaskan peran KAMMI sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengadvokasi keadilan sosial, reformasi pendidikan, dan supremasi hukum, meskipun sering kali menhadapi tantangan seperti respon keamanan.

---

<sup>83</sup> Agung Sandy Lesmana, Didemo Mahasiswa, DPRD Jateng Sepakat Tolak RKUHP dan RUU PKS. Semarang: Suara.com, 2019.